

**PENGARUH *FISCAL STRESS* TERHADAP PERTUMBUHAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN BELANJA MODAL
(Studi Pada Provinsi Jawa Timur Periode 2007-2009)**

ARTIKEL ILMIAH



Oleh :

THERESIA PUTRI SEJATI
2009310318

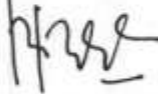
**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS
S U R A B A Y A
2013**

PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Theresia Putri Sejati
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 16 Juli 1991
N.I.M : 2009310318
Jurusan : Akuntansi
Program Pendidikan : Strata I
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan
Judul : Pengaruh *Fiscal Stress* Terhadap Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal
(Studi Pada Provinsi Jawa Timur Periode 2007-2009)

Disetujui dan diterima baik oleh:

Dosen Pembimbing
Tanggal:



(Nurul Hasanah Uswati Dewi, SE., M.Si., Ak)

Ketua Program Studi S1 Akuntansi
Tanggal:



(Supriyati, SE., M.Si., Ak)

**PENGARUH FISCAL STRESS TERHADAP PERTUMBUHAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN BELANJA MODAL
(Studi Pada Provinsi Jawa Timur Periode 2007-2009)**

Theresia Putri Sejati
STIE Perbanas Surabaya
Email : 2009310318@students.perbanas.ac.id
Jl. Nginden Semolo 34-36 Surabaya

ABSTRACT

Government has undergone many fundamental changes in the financial management area since implementing regional autonomy in 2001. Good financial management area requires not only reliable human resources but also to be supported by adequate local financial capacity. One is related to human resources, funds and other resources. Some areas are classified as the area is fortunate to have a potential source of revenue, which comes from taxes, levies etc., that can be used as a source of regional revenue. Autonomy can cause problems of its own in light of the demands of the independence of a region. Therefore, local governments are required to optimize any potential possessed by a region in terms of both revenue that local revenue and expenditure in the form of capital expenditures in order to avoid fiscal stress conditions that cause instability reception area. The purpose of this study was to see how the influence of fiscal stress on the growth of Revenue and Capital Expenditure in the province of East Java. The method used in this study is simple regression method, and the results of this analysis indicate that the fiscal stress very positive effect on Revenue and Fiscal stress has no effect on capitalexpenditures.

Keywords: Fiscal Stress, Revenue, Capital Expenditures

PENDAHULUAN

Paradigma dalam pengelolaan keuangan daerah telah mengalami perubahan yang sangat mendasar sejak Pemerintah menerapkan otonomi daerah pada tahun 2001. Undang – Undang (UU) No.32 Tahun 2004 dan UU No.33 Tahun 2004 yang menjadi landasan utama dalam pelaksanaan otonomi daerah pada hakekatnya memberikan peluang yang sangat besar kepada pemerintah, khususnya pemerintah daerah untuk lebih mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah, baik yang menyangkut sumber daya

manusia, dana maupun sumber daya yang lainnya yang merupakan salah satu milik kekayaan daerah. (Havid, 2011). Pengelolaan keuangan daerah yang baik tidak hanya membutuhkan sumber daya manusia yang handal tetapi juga harus didukung oleh kemampuan keuangan daerah yang memadai. Tingkat kemampuan keuangan daerah yang memadai salah satunya dapat diukur dari besarnya penerimaan daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah. Pengukuran kinerja keuangan pada pemerintah daerah digunakan untuk

menilai akuntabilitas dan kemampuan keuangan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Dengan demikian maka suatu daerah yang kinerja keuangannya dinyatakan baik berarti daerah tersebut memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah (Havid, 2011).

Kemakmuran suatu daerah dapat ditunjukkan salah satunya dengan pertumbuhan ekonomi yang baik, dimana salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah investasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Untuk dapat meningkatkan investasi maka kemampuan keuangan daerah juga harus memadai. Alokasi belanja modal pada pemerintah daerah juga dipengaruhi oleh baik tidaknya kinerja keuangan suatu daerah seperti desentralisasi, ketergantungan keuangan, kemandirian keuangan, efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan derajat kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dengan demikian terdapat keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi daerah dengan belanja modal (Havid, 2011).

Beberapa daerah tergolong sebagai daerah yang beruntung karena memiliki sumber penerimaan yang potensial, yang berasal dari pajak, retribusi daerah, maupun ketersediaan sumber daya alam yang memadai yang dapat dijadikan sumber penerimaan daerah. Namun, disisi lain bagi beberapa daerah, otonomi bisa menyebabkan persoalan tersendiri mengingat adanya tuntutan untuk kemandirian suatu daerah. Daerah mengalami peningkatan tekanan fiskal (*fiscal stress*) yang lebih tinggi dibanding dengan era sebelum otonomi daerah. Daerah dituntut untuk mengoptimalkan setiap potensi maupun kapasitas fiskalnya dalam rangka mengurangi tingkat ketergantungan terhadap sumber-sumber penerimaan daerah (Priyo, 2008). Pada masa krisis ekonomi, rata-rata pendapatan dan belanja daerah

kabupaten/kota mengalami penurunan secara signifikan. Sehingga penerimaan yang tidak stabil selama krisis ekonomi menyebabkan adanya kondisi *fiscal stress* (tekanan keuangan), sehingga terjadinya penurunan rata-rata pendapatan dan belanja daerah (Andayani:2004). Dalam hal ini dapat membuktikan bahwa Tekanan keuangan akan cepat terjadi apabila terjadinya penerimaan daerah yang tidak stabil dalam arti tidak sesuai dengan apa yang dianggarkan. Dalam hal ini dapat membuktikan bahwa pemerintah harus memiliki kesiapan dalam memasuki era otonomi, karena tekanan fiskal (*fiscal stress*) dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi pada pendapatan daerah dan belanja modal. Pada saat *fiscal stress* tinggi, pemerintah cenderung menggali potensi penerimaan pajak untuk meningkatkan penerimaan daerahnya (Shamsub dan Akoto:2004). Oleh karena itu, tingginya angka upaya pajak dapat diidentikkan dengan kondisi *fiscal stress*. Upaya pajak (*Tax Effort*) adalah upaya peningkatan pajak diukur melalui perbandingan antara sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah. *Tax Effort* menunjukkan upaya pemerintah untuk mendapatkan pendapatan bagi daerahnya dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki. Potensi dalam pengertian ini adalah seberapa besar target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah yang dicapai dalam tahun anggaran tersebut. Dalam hal ini dapat menunjukkan bahwa pemerintah harus bekerja keras dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerahnya melalui peningkatan pajak yang dapat berguna untuk mencapai tujuan bersama dalam membangun perekonomian suatu daerah.

Daerah dituntut untuk mengoptimalkan setiap potensi maupun kapasitas fiskalnya dalam rangka mengurangi tingkat ketergantungan terhadap sumber-sumber penerimaan daerah (Priyo, 2008). Pada masa krisis ekonomi, rata-rata

pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota mengalami penurunan secara signifikan. Sehingga penerimaan yang tidak stabil selama krisis ekonomi menyebabkan adanya kondisi *fiscal stress* (tekanan keuangan), sehingga terjadinya penurunan rata-rata pendapatan dan belanja daerah (Andayani:2004). Dalam hal ini dapat membuktikan bahwa Tekanan keuangan akan cepat terjadi apabila terjadinya penerimaan daerah yang tidak stabil dalam arti tidak sesuai dengan apa yang dianggarkan. Dalam hal ini dapat membuktikan bahwa pemerintah harus memiliki kesiapan dalam memasuki era otonomi, karena tekanan fiskal (*fiscal stress*) dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi pada pendapatan daerah dan belanja modal. Pada saat *fiscal stress* tinggi, pemerintah cenderung menggali potensi penerimaan pajak untuk meningkatkan penerimaan daerahnya (Shamsud dan Akoto:2004). Oleh karena itu, tingginya angka upaya pajak dapat diidentikkan dengan kondisi *fiscal stress*. Upaya pajak (*Tax Effort*) adalah upaya peningkatan pajak diukur melalui perbandingan antara sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah. *Tax Effort* menunjukkan upaya pemerintah untuk mendapatkan pendapatan bagi daerahnya dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki. Potensi dalam pengertian ini adalah seberapa besar target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah yang dicapai dalam tahun anggaran tersebut. Dalam hal ini dapat menunjukkan bahwa pemerintah harus bekerja keras dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerahnya melalui peningkatan pajak yang dapat berguna untuk mencapai tujuan bersama dalam membangun perekonomian suatu daerah.

Pemerintah daerah dapat mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah serta alokasi belanja modal yang memadai yang merupakan bagaian utama dalam penyusunan APBD sebagai upaya

meminimalkan ketergantungan penerimaan dari pemerintah pusat. Serta diharapkan dapat memberikan timbal balik berupa peningkatan penerimaan yang lainnya (Priyo Adi, 2008).

Pemerintah diharapkan dapat menggali potensi yang ada pada daerahnya, sehingga Pendapatan Asli Daerahnya dapat digunakan untuk membiayai belanja daerah disekitarnya, khususnya yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik untuk meningkatkan prasarana yang mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.

RERANGKA TEORITIS DAN HIPOTESIS

Fiscal Stress

Secara Sederhana dapat dikatakan bahwa pemerintah yang mengalami *fiscal stress* adalah pemerintah daerah yang kurang mampu menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik. Dengan arti lain, bahwa pemerintah yang mendapat dana dari penerimaan daerah yang tidak stabil selama krisis ekonomi yang dapat menyebabkan adanya kondisi tekanan keuangan (*Fiscal Stress*), sehingga terjadi penurunan rata-rata pendapatan dan belanja daerah (Andayani:2004). Dari pengertian tersebut dapat ditarik penjelasan bahwa *Fiscal Stress* merupakan suatu kondisi atau konflik yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dari tiap-tiap Kabupaten/Kota yang mengalami permasalahan akibat adanya keterbatasan dalam penerimaan daerah yang mengakibatkan pertumbuhan suatu daerah mengalami suatu masalah yang sangat rumit akibat tidak cukupnya Penerimaan Daerah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah harus bisa mengatur keuangan daerah seefektif dan seefisien mungkin dalam menjalankan kegiatan perekonomian suatu daerah yang dapat berguna untuk menciptakan perekonomian dan kemakmuran rakyat.

Fiscal Stress (tekanan keuangan) merupakan salah satu dampak dari krisis ekonomi yang menimpa Indonesia yang berupa tekanan kondisi keuangan. *Fiscal Stress* mengakibatkan ketidakpastian anggaran dari pihak pemerintah baik anggaran penerimaan maupun anggaran pengeluaran. Pada kenyataannya yang terjadi pada sektor pemerintahan di Indonesia sebagai dampak *fiscal stress* didukung dengan teori yang dikemukakan oleh Spicer dan Bingham dalam Beier (1998) yaitu “ketika perubahan faktor-faktor ekonomi, demografi, dan politik membatasi pertumbuhan pendapatan maka tingkat defisit yang terjadi semakin lebih sulit dan tekanan keuangan mungkin akan terjadi.

Menurut Rogers (1990) disamping ketidakpastian anggaran, dampak *fiscal stress* adalah mempengaruhi kesiapan suatu daerah dalam menghadapi otonomi daerah. Jika suatu daerah akan menghadapi otonomi daerah, kondisi keuangan daerah tersebut harus stabil, karena jika kondisi keuangan tidak stabil akan menjamin daerah tersebut membiayai daerahnya sendiri dan sukses dalam melaksanakan otonomi daerahnya.

Laporan keuangan Pemerintah Daerah

Salah satu aspek yang paling penting dalam pencapaian tata kelola Pemerintahan yang baik dalam membangun pertumbuhan perekonomian suatu daerah adalah menyusun anggaran APBD yang merupakan program kerja Tahunan Pemerintah Daerah dalam bentuk perangkaan (Rupiah). Sebagai pedoman daerah APBD ditetapkan dengan peraturan daerah yang digunakan sebagai pedoman untuk kegiatan pertumbuhan perekonomian selama satu periode. Dimana dalam penyelesaian anggaran tersebut akan menghasilkan sebuah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Dimana di dalam laporan keuangan pemerintah daerah ini merupakan satu komponen yang paling penting untuk menciptakan akuntabilitas dan

transparansi pengelolaan keuangan daerah disektor publik sebagaimana yang telah disepakati antara Legislatif dan Eksekutif, maka disusun dan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Meskipun demikian, informasi keuangan bukan merupakan tujuan akhir dari akuntansi sektor pemerintahan.

Laporan keuangan pemerintahan daerah menunjukkan kondisi keuangan daerah secara keseluruhan. Dari laporan ini akan terbaca bagaimana kondisi pemerintah yang sesungguhnya, termasuk kelemahan dan kekuatan yang dimilikinya. Laporan ini juga menunjukkan kinerja pemerintah daerah selama satu periode. Laporan keuangan juga memberikan informasi dasar pertimbangan untuk pengambilan keputusan.

Pertumbuhan Ekonomi

Secara umum pertumbuhan Ekonomi dapat diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam membangun perekonomian suatu daerah yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat dapat bertambah dan kemakmuran masyarakat dapat meningkat. Menurut Adi (2007) secara spesifik ada tiga faktor dalam dalam perekonomian ekonomi yaitu akumulasi modal, pertumbuhan penduduk, dan hal – hal yang berkaitan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja yang dianggap secara positif dapat merangsang dan menciptakan pertumbuhan perekonomian suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai meningkatnya kegiatan perekonomian pada suatu daerah yang berdampak pada tingkat kemakmuran dan kemandirian daerah. Pertumbuhan ekonomi akan terjadi apabila seluruh pemangku kepentingan di daerah bekerja sama dalam membangun dan meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi seperti meningkatkan investasi untuk

pembangunan di sektor – sektor yang produktif.

Pengertian Tentang Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen sumber Pendapatan Daerah sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Sumber Pendapatan Daerah terdiri dari:

1. Hasil Pajak Daerah

Jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Sedangkan jenis pajak daerah untuk kabupaten terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C.

2. Hasil Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Ada tiga golongan retribusi daerah yaitu:

a. Retribusi jasa umum, yaitu retribusi atas jasa yang diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

b. Retribusi jasa usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya

dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

c. Retribusi perizinan tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana/fasilitas tertentu guna untuk melindungi kepentingan umum dan kelestarian lingkungan.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Pendapatan yang berupa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, terdiri dari bagian laba atas penyertaan modal/investasi pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal/investasi pada perusahaan milik pemerintah/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal/investasi pada perusahaan milik swasta.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terdiri dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dapat dipisahkan, penerimaan jasa giro, penerimaan bunga, penerimaan ganti rugi atas ke-18 daerah (TGR), komisi, dan keuntungan selisih nilai tukar rupiah, denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, denda pajak, denda retribusi, hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas social dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan,

pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan, dan lain-lain.

Pengertian Tentang Belanja Modal

Menurut (Havid, 2011) Belanja Modal adalah pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya lebih dari satu tahun anggaran dan akan menambah asset atau kekayaan daerah dan berakibat menambah belanja yang bersifat rutin. Belanja modal dapat diklasifikasikan dalam dua kelompok yaitu belanja publik dan belanja aparatur.

1. Kelompok kedua adalah belanja aparatur yaitu belanja yang manfaatnya tidak dinikmati langsung oleh masyarakat tetapi dapat dinikmati dan dirasakan langsung oleh aparatur. Misalnya: Pembangunan jembatan, pembelian mobil ambulans untuk umum dan lain-lain.
2. Kelompok kedua adalah belanja aparatur yang merupakan belanja yang memiliki manfaat untuk dapat dinikmati oleh masyarakat. Misalnya: pembangunan gedung dewan, pembelian mobil dinas, dan lain-lain. Hampir semua anggaran belanja modal mengandung komitmen adanya pengeluaran dalam jangka waktu yang cukup panjang.

Belanja modal sangat erat kaitannya dengan investasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Halim (2008) menyatakan bahwa kata investasi dapat diartikan macam-macam tergantung pada titik pandang atau konteks dalam mengartikannya. Investasi termasuk dalam pengertian belanja modal adalah capital expenditure, yang didefinisikan sebagai

belanja /biaya /pengeluaran yang memberikan manfaat.

Dalam PP No. 58 Tahun 2005 disebutkan bahwa belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan, dan mesin. Gedung dan bangunan, jaringan, buku perpustakaan dan hewan.

Menurut Halim (2001) telah memberikan fakta yang cukup empiris bahwa fiscal stress dapat mempengaruhi APBD suatu daerah, sehingga hal ini dapat dibuktikan bahwa adanya pergeseran (kenaikan/penurunan) dari komponen penerimaan dan pengeluaran APBD. Dalam hal ini menunjukkan bahwa komponen penerimaan dan pengeluaran suatu APBD dapat menimbulkan kondisi *fiscal stress* suatu daerah, sehingga kemakmuran suatu daerah tidak dapat sesuai dengan apa yang dianggarkan oleh pemerintah daerah dan dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat menjadi lambat. Oleh karena itu pemerintah daerah dituntut untuk proaktif dalam mengatur baik adanya penerimaan dan pengeluaran daerahnya secara konsumtif, dalam arti bahwa pemerintah harus sesuai dengan apa yang dikerjakan sesuai dengan program kerja yang dijalankan oleh pemerintah.

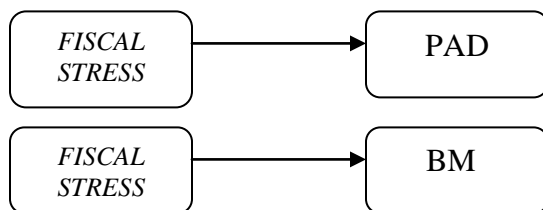
Hal ini dapat menunjukkan bahwa tingkat pembiayaan daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi fiscal stress sehingga pemerintah harus bersikap lebih optimis dalam meningkatkan potensi pendapatan suatu daerah.

Dalam Penelitian (Andayani:2004) telah mengungkapkan bahwa dalam menguji kondisi fiscal stress, daerah yang mengalami *fiscal stress* yang tinggi yaitu pada saat krisis ekonomi maka terdapat kecenderungan dalam peningkatan belanja

modal suatu daerah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa suatu daerah dapat mengalami kecenderungan *fiscal stress* pada saat belanja suatu daerah itu meningkat.

Variabel – variabel tersebut dapat digambarkan dalam kerangka pemikiran teoritis berikut ini:

Variabel – variabel tersebut dapat digambarkan dalam kerangka pemikiran teoritis berikut ini:



METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Tujuan penelitian ini merupakan pengujian hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian ini menggunakan data setiap Tahunnya mulai tahun 2007-2009. Penelitian tersebut bertujuan untuk menjelaskan berbagai kondisi dari berbagai variabel yang ada sekaligus menjadi objek penelitian tersebut berdasarkan apa yang terjadi dan mencari pengaruh antar variabel yang diteliti. Adapun subyek penelitian ini yaitu Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Periode 2007-2009. Pengujian yang dilakukan menggunakan alat uji statistik regresi sederhana.

Apabila kita ingin menerapkan hasil prediksi tersebut pada populasi lain, maka populasi tersebut harus memiliki kriteria yang sama dengan populasi yang diambil sampelnya. Penjelasan tentang jenis penelitian ini dapat ditinjau dari dua aspek yaitu:

1. Dilihat berdasarkan jenis datanya, penelitian ini menggunakan data sekunder dan metode yang digunakan dalam pengambilan sampel ini menggunakan purposive

sampling. Dan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif. Dimana di dalam penelitian ini, peneliti memperoleh datanya dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah beserta peraturan-peraturannya yang ditetapkan oleh pemerintah yang diperoleh dari BPK RI Prov. Jawa Timur dan BPS Prov. Jawa Timur melalui media dokumentasi.

2. Dilihat dari metode analisisnya, penelitian ini menggunakan analisis regresi sederhana yang digunakan untuk mengukur pengaruh antara satu variabel dengan variabel yang lain.

Batasan Penelitian

a. Batasan Waktu

Di dalam penelitian ini, batasan waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah Tiga Tahun yang dimulai dari Tahun Anggaran 2008 sampai tahun anggaran 2010, namun dikarenakan Data Laporan Keuangan Statistik yang berada di BPS Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2010 belum dikirim oleh Pemerintah Pusat sehingga peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian selama Tiga Tahun yang terhitung mundur dari tahun 2007-2009.

b. Batasan Daerah

Batasan daerah dalam penelitian ini adalah Seluruh kabupaten/Kota Pemerintahan Provinsi Jawa Timur.

Identifikasi Variabel

Berdasarkan kerangka pikir yang telah disusun, variabel yang digunakan sebagai pedoman pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Independen variabel.

- *Fiscal Stress*

Dependen variabel.

- Pendapatan Asli Daerah
- Belanja Modal

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Adapun definisi operasional dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Variabel independen Fiscal Stress

Definisi operasional variabel Independen yang digunakan dalam penelitian ini oleh peneliti adalah permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam menghadapi *fiscal stress* (Tekanan Keuangan) pada pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dan pertumbuhan Belanja Modal. Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah disebabkan karena Pemerintah Daerah mengalami ketidak pastian dalam mengatur kinerja keuangannya, sehingga kinerja keuangan yang dihasilkan ini tidak stabil dalam menjalankan kegiatan pertumbuhan perekonomian suatu Negara dan dapat menyebabkan kegiatan perekonomian ini mengalami tekanan keuangan (*Fiscal Stress*).

Fiscal Stress merupakan suatu kondisi atau permasalahan yang dapat menyebabkan terjadinya krisis keuangan akibat tidak cukupnya penerimaan atau pendapatan dalam memenuhi kebutuhan pengeluarannya (Priyo:2008). Perhitungan *Fiscal Stress* ini dapat diukur melalui upaya pajak yang dapat diperhitungkan berdasarkan realisasi penerimaan dibandingkan dengan nilai potensi pendapatan. *Fiscal stress* yang tinggi dengan indikator upaya pajak dapat mencerminkan dalam beberapa hal yaitu pemerintah daerah ditekankan untuk berupaya lebih keras dalam mengoptimalkan berbagai potensi (realisasi penerimaan) daerah yang dimiliki, sehingga realisasi penerimaan pajaknya menjadi lebih besar sehingga pemerintah daerah lebih teliti dan berhati-hati dalam mengatur penetapan anggaran penerimaan.

Variabel dependen Pendapatan Asli Daerah

Merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara umum. Pengumpulan dana tersebut bertujuan untuk membiayai berbagai keperluan daerah yang bersangkutan. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah yang dapat diukur berdasarkan pendapatan asli daerah periode APBD dibagi dengan pendapatan asli daerah periode APBD sebelumnya (Priyo Adi, 2008).

Variabel dependen Belanja Modal

Merupakan Belanja Modal untuk pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya (Sulistyowati). Pertumbuhan Belanja Modal dapat diukur berdasarkan Belanja Modal periode APBD dibagi dengan Belanja daerah periode APBD sebelumnya (Priyo Adi, 2008).

Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota yang terletak di Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari 1 Provinsi yang meliputi, 29 Kabupaten dan 9 Kota. Dari populasi yang ada akan diambil sejumlah tertentu sebagai sampelnya, yaitu Laporan Statistik Keuangan Pemerintah daerah yang terdaftar di BPS (Badan Pusat Statistik) Provinsi Jawa Timur pada periode 2007-2009 dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terdaftar di BPK-RI Provinsi Jawa Timur.

Sampel dalam penelitian ini adalah semua kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 9 Kota dengan waktu tiga tahun selama tahun

2007 sampai dengan tahun 2009 sebanyak 114 sampel.

Periode pengamatan yang akan dilakukan penulis adalah untuk jangka waktu 3 tahun yaitu dari tahun anggaran 2007 sampai dengan tahun anggaran 2009. Agar dapat memenuhi tujuan penelitian, maka sampel yang digunakan dalam penelitian ini harus memenuhi beberapa Kriteria pemilihan sampel yang akan diteliti yang berada di Provinsi Jawa Timur yang meliputi sebagai berikut:

1. Laporan keuangan Pemerintah Daerah yang berupa data realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah periode Tahun 2007-2009 yang terdaftar di BPK-RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur dan Laporan Statistik Keuangan yang terdaftar di Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur.
2. Laporan keuangan yang berakhir pada 31 desember.

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN Uji Normalitas

Pengujian ini juga didukung dengan analisis statistik *one-sample Kolmogorov-Smirnov* test dengan tingkat signiikan 0,05 (Imam Ghozali, 2011:163). Uji normalitas data ini sebaiknya dilakukan sebelum data diolah berdasarkan model-model penelitian. Uji normalitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi variabel dependent dan variabel independent mempunyai distribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini, pengujian normalitas dilakukan dengan uji *Kolmogorov Smirnov*. Prosedur pengujian normalitas adalah dengan menguji residualnya. Hipotesis pada uji normalitas adalah sebagai berikut:

- Ho : Residual berdistribusi normal
 H1 : Residual tidak berdistribusi normal

Table 4.9
 UJI NORMALITAS PAD TAHAP 1

Indikasi	Residual
Kolmogorov Smirnov	1.165
Signifikansi	.132

Berdasarkan Tabel 4.9 Dapat dilihat bahwa nilai signifikansi yang dihasilkan oleh variabel PAD dari uji norma 28 h dari 0,05 yaitu 0,132 yang berarti regresi sudah memenuhi asumsi normalitas.

Table 4.10
 UJI NORMALITAS BM TAHAP 1

Indikasi	Residual
Kolmogorov Smirnov	2.678
Signifikansi	.000

Berdasarkan Tabel 4.10 Dapat dilihat bahwa nilai signifikansi yang dihasilkan oleh Variabel BM dari uji normalitas kurang dari 0,05 yaitu 0,000 yang berarti model regresi belum memenuhi asumsi normalitas. Penyebab model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas adalah adanya outlier (data ekstrim) pada data penelitian, oleh karena itu perlu dilakukan deteksi outlier untuk menghilangkan nilai outlier tersebut.

Deteksi outlier dilakukan dengan menggunakan nilai *standardized* residual, dengan kriteria apabila nilai *standardized* residual berada di luar rentang -3 sampai dengan +3 maka merupakan outlier dan observasi yang mengandung outlier tersebut harus dikeluarkan. Setelah dilakukan deteksi outlier pada data, diketahui bahwa ada lima data yang mengandung data outlier yaitu pada tahun 2007 terdapat satu data outlier yaitu Kota Mojokerto, sedangkan pada tahun 2008 terdapat tiga data outlier yaitu Kabupaten Jember, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Batu dan pada tahun 2009 terdapat satu data outlier yaitu Kota Madiun yang memiliki nilai *standardized* di luar rentang antara -3 sampai dengan +3. Sehingga observasi yang mengandung lima

data outlier tersebut harus dikeluarkan dari data dan kemudian dilakukan pengujian normalitas kembali dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.11
UJI NORMALITAS BM TAHAP 2

Indikasi	Residual
Kolmogorov Smirnov	1.002
Signifikansi	.269

Berdasarkan Tabel 4.11 diketahui bahwa nilai signifikansi yang dihasilkan dari uji normalitas setelah data outlier dikeluarkan adalah lebih dari 0,05 yaitu 0,269. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi sudah memenuhi asumsi normalitas.

Pengujian Hipotesis

Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis regresi sederhana yang dibantu program SPSS versi 16.0. Alat bantu tersebut digunakan untuk membantu menghubungkan antara variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

Persamaan regresi untuk menguji pengaruh Fiscal Stress terhadap Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dan pengaruh Fiscal Stress terhadap Pertumbuhan Belanja Modal.

$$1. Y_1 = a + \beta X + e$$

$$2. Y_2 = a + \beta X + e$$

Keterangan:

X = *Fiscal Stress*

Y₁ = Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah

Y₂ = Pertumbuhan Belanja Modal

A = Intercept

e = Error

Deskripsi Variabel

Peneliti ini menggunakan tiga variabel terdiri atas satu variabel independen dan dua

variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah *Fiscal Stress*, sedangkan variabel dependen penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal. Variabel Pendapatan Asli Daerah dan belanja Modal dalam penelitian dapat diperoleh dari website laporan keuangan Statistik Pemerintahan (LKPD) untuk tiap tahun yang dimulai dari tahun 2007-2009. Variabel independen disini adalah *Fiscal Stress* yang dalam penelitian ini diperoleh dari website laporan keuangan setiap tahun dari tahun 2007-2009 yang perhitungannya diperoleh dari Total Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan Potensi Pendapatan Asli Daerah.

$$UPPAD_j = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Potensi PAD}}$$

Keterangan:

UPPAD_j = Upaya peningkatan sumber-sumber PAD

Realisasi PAD = Realisasi penerimaan sumber-sumber PAD

Potensi PAD = Target penerimaan sumber-sumber PAD

Variabel Dependen Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dalam penelitian ini dapat diperoleh dari Laporan Statistik Keuangan Pemerintah tahun 2007-2009 yang perhitungannya diperoleh dari Total PAD tahun sekarang dibagi dengan total PAD tahun sebelumnya.

$$PPAD(t) = \frac{PAD_t}{PAD_{t-1}}$$

Keterangan:

PPAD(t) = Pertumbuhan Pendapatan Daerah periode t

PAD(t) = Pendapatan Asli Daerah periode t

PAD (t-1) = Pendapatan Asli Daerah periode t-1

Variabel dependen penelitian ini yaitu Pertumbuhan Belanja Modal. Belanja Modal tersebut dapat diperoleh dari website laporan keuangan setiap tahun yang dimulai dari tahun 2007-2009. Data yang diperlukan tersebut dapat diperoleh dari laporan keuangan melalui website BPs.go.id atau kantor Pusat BPS Provinsi Jawa Timur yang berada di Jalan Kendangsari.

$$PBM(t) = \frac{BMt}{BMt-1}$$

Keterangan:

PBM(t) = Pertumbuhan Belanja Modal periode t

BM(t) = Belanja Modal periode t

BM (t-1) = Belanja Modal periode t-1

Tabel 1.1
Analisis Deskriptif

	N	Minimum	Max	Mean
FS	114	,772	2,160	1,24644
PAD	114	,9	1,9	1,168
BM	114	,2	11,7	1,239

Berdasarkan pada data statistik di atas menggambarkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berjumlah 114, dimana di dalam data ini diperoleh dari laporan keuangan Statistik Keuangan Pemerintah setiap tahun mulai tahun 2007-2009, dengan sampel laporan keuangan Statistik Keuangan Pemerintah tahun 2007-2009. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa variabel *Fiscal Stress* keseluruhan sudah menunjukkan suatu peningkatan yang baik untuk setiap tahunnya, karena dengan semakin meningkatnya *Fiscal Stress* suatu daerah maka juga akan semakin baik pemerintah

dalam mengoptimalkan sumber-sumber penerimaannya yang berasal dari pajak sehingga pemerintah daerah dapat menghindari ketergantungan terhadap pemerintah pusat serta dapat semakin mandiri dalam memanfaatkan sumber-sumber penerimaan yang diterima dari pajak untuk tiap-tiap daerah. Oleh sebab itu, pemerintah disarankan agar memberikan umpan balik yang baik tentang tata kelola yang diatur oleh pemerintah untuk melayani publik. Sedangkan untuk variabel Pendapatan Asli Daerah, disini menunjukkan bahwa semakin rendah pendapatan asli daerah untuk tiap pemerintah, maka juga akan semakin tinggi upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber penerimaan yang ada dengan cara menggali semua potensi yang ada di daerahnya untuk meminimalisir ketergantungan terhadap pemerintah pusat, sehingga pemerintah dapat konsumtif dalam hal mengatur keuangan daerahnya, agar upaya yang dihasilkan tersebut dapat membuahkan hasil yang memuaskan, khususnya untuk pelayanan publik kepada masyarakat. Dan tabel tersebut terlihat bahwa rata-rata untuk setiap tahunnya untuk variabel Pendapatan Asli ini menunjukkan peningkatan yang cukup spesifik meskipun hanya beberapa persen dari hasil sebelumnya. sehingga untuk tiap tahunnya, peningkatan tersebut lama-kelamaan akan mengalami kenaikan.

Untuk variabel Belanja Modal disini telah menunjukkan bahwa semakin rendah belanja Modal maka juga akan semakin rendah pemerintah dalam membiayai pengeluaran untuk kegiatan pemerintahan. Hal ini berarti bahwa penerimaan yang diterima oleh pemerintah dari sumber-sumber pajak tersebut yang dihasilkan hanya sedikit saja, sehingga pemerintah tidak dapat membiayai pengeluarannya untuk membiayai kegiatan operasional pemerintahan untuk rakyat, sehingga

pertumbuhan Belanja Modal tersebut menjadi terhambat karena tidak adanya sumber penerimaan yang memungkinkan. Oleh sebab itu, pemerintah mengharapkan agar semakin tinggi Belanja Modal suatu daerah maka juga akan semakin tinggi pemerintah daerah dalam membiayai pengeluarannya untuk kegiatan pemerintahan, sehingga pertumbuhan Belanja Modal dapat menjadi lancar tanpa hambatan apapun. Dan pada tabel diatas telah menunjukkan bahwa semakin tinggi peningkatan Belanja Modal untuk setiap tahunnya di setiap suatu daerah, hal ini membuktikan bahwa tiap pemerintah daerah mampu secara konsumtif dalam mengatur keuangan tersebut untuk membiayai daerahnya sehingga menyebabkan suatu daerah tersebut dapat semakin maju sama halnya seperti apa yang diterapkan oleh pemerintah daerah lainnya.

Uji Normalitas

. Berdasarkan hasil analisis statistik *one-sample Kolmogorov-Smirnov* test bahwa signifikansi yang dihasilkan dari semua variabel yang terdapat dalam penelitian ini yaitu Fiscal Stress terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 0.132, dimana angka tersebut lebih besar di atas 0.05 atau 5 persen maka dapat dikatakan bahwa model regresi ini memiliki distribusi secara normal. Sedangkan untuk variabel Fiscal stress terhadap Belanja Modal menunjukkan angka sebesar 0,269 dimana angka tersebut menunjukkan bahwa angka tersebut lebih besar dari 0,05 atau 5 persen yang menjelaskan bahwa data dalam model regresi tersebut berdistribusi normal.

Analisis Regresi Sederhana

Analisis regresi sederhana bertujuan untuk menguji hubungan pengaruh antara satu variabel terhadap variabel lain serta untuk mengetahui pengaruh hubungan variabel independen (X) terhadap variabel

dependen (Y). Sehingga dapat diketahui signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam hal ini digunakan analisis regresi sederhana karena variabel dependen yang digunakan pada penelitian ini lebih dari satu.

1. Analisis regresi sederhana dilakukan untuk mengetahui apakah *Fiscal Stress* berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah dan untuk mengetahui juga apakah Fiscal stress berpengaruh terhadap Belanja Modal. Pengolahan data menggunakan alat bantu Komputer dengan program SPSS 16.0. Dari pengolahan data diperoleh hasil-hasil sebagai berikut. Untuk menjawab tujuan penelitian, maka dibuat suatu model persamaan regresi sederhana yaitu sebagai berikut:

1. Variabel independen yaitu *stress* terhadap variabel dependen yaitu Pendapatan Asli Daerah. Model regresi sederhana yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y1 = a + \beta X + e$$

Dimana :

X = *Fiscal Stress*

Y1 = Pertumbuhan

Pendapatan Asli Daerah

a = Intercept

β = Koefisien regresi

e = *Error*

2. Variabel independen yaitu *fiscal stress* terhadap variabel dependen yaitu Pendapatan Asli Daerah. Model regresi sederhana yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y2 = a + \beta X$$

Dimana :

X = *Fiscal Stress*

Y2 = Pertumbuhan Belanja Modal

a = Intercept

β = Koefisien regresi

Uji Hipotesis

Analisis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi sederhana untuk mengetahui pengaruh Fiscal Stress terhadap pertumbuhan Pendapatan Asli daerah dan Belanja Modal. yang ada pada laporan keuangan Keuangan Statistik Pemerintahan yang datanya diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (bps.go.id). Adapun hasil pengujian melalui bantuan SPSS versi 16 menunjukkan persamaan model regresi sebagai berikut:

$$PAD = 0,651 + 0,415 FS + e$$

Jika segala sesuatu pada variabel-variabel independent dianggap konstan maka nilai Pendapatan Asli Daerahnya (Y) adalah sebesar 0,651. Tanda positif pada nilai koefisien regresi akan melambangkan hubungan yang searah antara X dan Y1. Hal ini dapat membuktikan bahwa fiscal stress meningkat, maka Pendapatan Asli Daerah juga akan mengalami peningkatan.

$$BM = 1,037 + 0,094 FS + e$$

Jika segala sesuatu pada variabel-variabel independent dianggap konstan maka nilai Belanja Modal (Y) adalah sebesar 1,037. Tanda positif pada nilai koefisien regresi akan melambangkan hubungan yang searah antara X dan Y2. Hal ini dapat membuktikan bahwa fiscal stress meningkat, maka Belanja Modal juga akan mengalami peningkatan

Hasil uji secara simultan atau Uji F Pendapatan Asli Daerah, dapat disimpulkan bahwa hasilnya adalah berpengaruh positif dan signifikan sebesar 0,000 yang kurang dari alfa sebesar 0,05 atau 5 % dan memenuhi asumsi uji secara simultan. Maksudnya adalah tingkat signifikansi 0,000 jauh lebih kecil dari 0,05. Hal ini menyatakan bahwa Ho ditolak, artinya bahwa Fiscal Stress memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dengan kata lain, bahwa variabel-variabel independen secara bersama-sama

memperngaruhi pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah secara signifikan dan menunjukkan juga bahwa *fiscal stress* juga mampu mempengaruhi Pendapatan Asli Daerahnya. Bila dilihat dari nilai besarnya adjusted R2 adalah 0,225, hal ini berarti 22,5% Variabel Pendapatan Asli Daerah dapat dijelaskan oleh Variabel *Fiscal stres* yang digunakan didalam penelitian ini. Sedangkan sisanya (100% - 22,5% = 77,5 %) dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Sedangkan untuk Hasil uji secara simultan atau uji F Belanja Modal, dapat disimpulkan bahwa hasilnya adalah berpengaruh positif dan tidak signifikan karena nilainya sebesar 0,668 atau 66,8% yang lebih dari alfa sebesar 0,05 atau 5 % dan tidak memenuhi uji secara simultan. Maksudnya adalah tingkat signifikansi 0,668 jauh lebih besar dari 0,05 yang menyatakan Ho diterima, artinya *Fiscal stress* tidak memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal.

Bila dilihat dari nilai besarnya untuk Belanja Modal adjusted R2 adalah- 0,008, hal ini berarti -0,8% Variabel Belanja Modal dapat dijelaskan oleh Variabel *Fiscal stres* yang digunakan didalam penelitian ini. Sedangkan sisanya (100% - (-0,8%) = 99,2 %) tidak mampu dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Tabel 1.2
Uji F

Model	F	Sig.
PAD	33.748	.000
BM	0.185	0.668

Pada bagian ini akan dibahas analisis terhadap hasil temuan teoritis. Pembahasan dilakukan berdasarkan pada temuan empiris maupun teori dan penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Untuk mempermudah pembahasan atas analisis yang dilakukan,

akan diuraikan pengaruh *Fiscal Stress* terhadap Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah serta pengaruhnya *Fiscal Stress* terhadap Pertumbuhan Belanja Modal.

Pada masa krisis ekonomi, rata-rata pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota mengalami penurunan secara signifikan. Sehingga penerimaan yang tidak stabil selama krisis ekonomi menyebabkan adanya kondisi *fiscal stress* (tekanan keuangan), sehingga terjadinya penurunan rata-rata pendapatan dan belanja daerah (Andayani:2004). Dalam hal ini dapat membuktikan bahwa Tekanan keuangan akan cepat terjadi apabila terjadinya penerimaan daerah yang tidak stabil dalam arti tidak sesuai dengan apa yang dianggarkan. Dalam hal ini harus dapat dibuktikan bahwa pemerintah harus memiliki kesiapan dalam memasuki era otonomi, karena tekanan fiskal (*fiscal stress*) dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi pada pendapatan daerah dan belanja modal.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif dan signifikan antara *fiscal stress* terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa dengan adanya keterbatasan dalam penerimaan daerah terhadap peningkatan pertumbuhan PAD yang dipengaruhi oleh Fiscal Stress selama otonomi daerah merupakan indikasi yang kuat karena semakin besar usaha yang dilakukan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menggali dan memanfaatkan sumber-sumber PADnya. Sehingga selama otonomi daerah, pemerintah dapat mengupayakan pendapatan asli daerahnya dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan rutinnya sehingga dapat mengurangi tingkat ketergantungannya terhadap pemerintah pusat. Hal ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Priyo Adi (2008) yang menyatakan bahwa dalam penelitiannya, peneliti tersebut memberikan implikasi bahwa pemerintah harus melakukan suatu

upaya yang lebih insentif melalui penggalan potensi sumber-sumber penerimaan daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah agar mampu meningkatkan pertumbuhan PAD. Salah satu langkah yang dapat ditempuh adalah bahwa setiap pemerintah Kabupaten/Kota harus lebih efektif dalam pengalokasian belanja modal/pembangunan guna memenuhi kepentingan publik, baik yang mendukung pertumbuhan ekonomi maupun untuk pelayanan publik secara langsung.

Pada hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif dan signifikan antara *fiscal stress* terhadap pertumbuhan Belanja Modal. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa tingginya upaya pemerintah dalam meningkatkan belanja modalnya, untuk dapat memperbaiki maupun menambah berbagai infrastruktur yang mendukung perekonomian atau dengan meningkatkan pelayanan pemerintah terhadap publik didukung dari adanya sumber-sumber potensi pendapatan yang telah digali oleh pemerintah pusat. Sehingga pembangunan suatu daerah selama otonomi daerah mempunyai manfaat tersendiri bagi daerahnya itu sendiri baik untuk rakyat sekitarnya maupun yang lainnya.

KESIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN

Pada bagian akhir penelitian ini, penulis akan menyimpulkan secara singkat tujuan dari penelitian dan populasi sampel perusahaan dalam penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk menganalisis pengaruh Fiscal Stress terhadap pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah baik secara simultan dengan sampel penelitian yang ada pada Pemerintah Kabupaten/Kota yang terletak pada Propinsi Jawa Timur.

2. Untuk menganalisis pengaruh Fiscal Stress terhadap pertumbuhan Belanja Modal baik secara simultan dengan sampel penelitian yang ada pada Pemerintah Kabupaten/Kota yang terletak pada Propinsi Jawa Timur.

Populasi dari penelitian ini adalah pemerintah daerah yang berada dipropinsi Jawa Timur. Sedangkan teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah metode dokumenter dimana semua populasi menjadi sampel penelitian sehingga diperoleh 38 sampel selama satu tahun yang terdiri dari 29 kabupaten dan 9 kota. Periode pengamatan dalam studi ini adalah dari tahun anggaran 2007 hingga tahun anggaran 2009.

Berdasarkan pada uraian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai Berikut:

1. Pengaruh Fiscal Stress terhadap Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah menunjukkan bahwa Fiscal Stress secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini membuktikan bahwa semakin rendah fiscal stress terhadap Pendapatan Asli Daerah maka akan semakin tinggi Pendapatan Asli Daerahnya karena pemerintah dapat mencari jalan keluar salah satunya dengan mengoptimalkan Potensi-potensi penerimaan daerah yang ada yang berasal dari pajak, retribusi daerah dan yang lain-lainnya. Sehingga pemerintah semakin mandiri dan terhindar dari pemerintah pusat serta dapat memberikan umpan balik yang baik kepada daerahnya khususnya dalam tata kelola pemerintahannya.
2. Pengaruh Fiscal Stress terhadap Pertumbuhan Belanja Modal menunjukkan bahwa Fiscal Stress berpengaruh positif tetapi tidak

signifikan terhadap Belanja Modal. Hal ini menunjukkan apabila fiscal stress dikaitkan dengan Belanja Modal, maka dengan fiscal stress yang rendah pemerintah dapat membiayai pengeluaran pemerintah yang tidak ada batasannya sehingga menyebabkan pertumbuhan Belanja Modal semakin hari semakin naik karena tidak adanya keterbatasan penerimaan daerah dalam membiayai pengeluaran daerah sehingga terjadinya pertumbuhan Belanja Modal yang tidak sesuai dengan apa yang pemerintah harapkan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini serta pengujian yang telah dilakukan dapat dikemukakan beberapa saran untuk penelitian selanjutnya, antara lain sebagai berikut:

1. Sebaiknya untuk penelitian selanjutnya dapat menambah dengan wawancara kepada pemerintah daerah yang akan diteliti agar penelitian tersebut dapat menjadi kompleks.
2. Untuk penelitian berikutnya dapat memasukkan kabupaten/kota yang berada diluar Jawa Bali misalnya Sulawesi atau yang lainnya dan membandingkan keduanya.
3. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

Keterbatasan Penelitian

Peneliti menyadari adanya beberapa keterbatasan dalam penulisan penelitian ini. Penelitian ini memiliki beberapa

keterbatasan yang memerlukan perbaikan dan pengembangan dalam studi-studi berikutnya. Keterbatasan studi ini adalah:

1. Periode penelitian ini hanya tiga tahun, yaitu periode 2007 sampai dengan periode 2009.
2. Data yang digunakan dalam penelitian ini hanya menggunakan data sekunder, sehingga hanya bisa meneliti dari pihak pemerintahan dan disisi lain kurangnya data yang lengkap dalam penelitian ini sehingga hanya bisa meneliti selama tiga periode.
3. Penelitian ini hanya berfokus pada Pemerintahan khususnya pemerintah kabupaten/kota seluruh provinsi Jawa Timur.
4. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini hanya tiga variabel yang meliputi *Fiscal stress* (FS), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Belanja Modal (BM).

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul, Halim. 2001. Anggaran Daerah dan *Fiscal Stress* (Sebuah Studi Kasus pada Anggaran Daerah Provinsi Indonesia). Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia Vol 16, No 02 Oktober.
- Agus, Irianto. 2004. Statistik Konsep Dasar Dan Aplikasinya. PRENADA MEDIA. Jakarta
- Ayu Madyaningtyas. 2011. “ Analisis Pengaruh DAU (Dana Alokasi Umum) dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah (Studi Empirik di wilayah Propinsi Jawa Timur)”. Skripsi Sarjana tak diterbitkan, STIE Perbanas Surabaya
- Bhuono, Agung Nugroho.2011.Memilih Metode Statistik Penelitian dengan SPSS.Andi Yogyakarta.
- Diah Ayu, Kusumadewi Dan Rahman Arief.2007. *Flypaper Effect* Pada Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Indonesia .Jurnal JAAI Vol 11, No 01 Juni.
- Fitriana Dwi Lestari. 2012. “ Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah di Kabupaten Lamongan”. Skripsi Sarjana tak diterbitkan, STIE Perbanas Surabaya
- Havid, Sularso. Dan E.Restianto, Yanuar.2011.Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal Dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah.Jurnal Media Riset Akuntansi Vol 01, No 02 Agustus.
- Johan, Arifin.2005. Analisis Kinerja Keuangan Sebelum Dan Pada Saat *Fiscal Stress* (Studi Terhadap Beberapa Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat). Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Sektor Publik Vol 06, No 02 Agustus.
- Nurlan, Darise. 2008. Akuntansi Keuangan Daerah. PT.Indeks. Jakarta
- Priyo, Adi, Hari.2008. Pengaruh *Fiscal Stress* Terhadap Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah).Simposium Nasional Riset Ekonomi & Bisnis.Universitas Kristen Satya Wacana.Salatiga

Sulistiyowati, Firma. Akuntansi Sektor
Publik. BPFE. Yogyakarta

Undang – Undang No. 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi
dan Retribusi Daerah